



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan untuk menjamin kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran, sehingga tercapai tujuan pembangunan Daerah yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Purworejo, diperlukan perencanaan secara holistik, integratif, spasial dan tematik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman perencanaan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Purworejo Tahun 2026, diperlukan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2026 dan berakhir pada 31 Desember 2026.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja PD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2026 dan berakhir pada 31 Desember 2026.

Pasal 2

- (1) Dokumen Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- (2) Dokumen Renja PD Tahun 2026 disusun berpedoman kepada rancangan rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026.

Pasal 3

- (1) Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I : pendahuluan;
 - b. bab II : hasil evaluasi rencana kerja perangkat daerah tahun lalu;
 - c. bab III : tujuan dan sasaran perangkat daerah;
 - d. bab IV : rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - e. bab V : penutup.
- (2) Dokumen Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 01 Agustus 2025



Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 01.08.2025

P.j SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025 NOMOR 22 SERI E NOMOR 19

LAMPIRAN XXXVIII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026

LAMPIRAN XXXVIII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Dokumen Renja satuan perangkat daerah adalah dokumen perencanaan tahunan pada level satuan kerja perangkat daerah dan disusun sebagai penjabaran rencana strategis (renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan dan sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai tupoksinya, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja merupakan dokumen yang secara substansi penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang sebagai awal dalam penyusunan anggaran.
2. Renja merupakan acuan untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rancangan Akhir Renja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Renja sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Persyaratan penyusunan RAPBD melalui tahap sebagai berikut :
 - 1) Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

- 2) Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
- 3) Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
- 4) Program dan kegiatan dalam dokumen Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

Renja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bruno serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam waktu yang bersangkutan dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik pada Kecamatan. Untuk itulah perlunya penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bruno Tahun 2026.

2.1.1 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Seluruh dokumen rencana pembangunan merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, dimulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan anggaran. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Bruno mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Purworejo dan Renja Kecamatan Bruno sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah PD (Renstra) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Kecamatan Bruno mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan akhir RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan akhir Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan

Selain itu Rancangan akhir juga selaras dengan rencana-rencana resmi daerah di atasnya seperti RKPD, Renstra PD dan RPJMD Kabupaten /Kota. Renja PD juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD dan APBN. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 1.1.

The diagram illustrates the SKPP (Strategic Planning Process) flow, starting with the initial planning phase and moving through various stages of development, review, and implementation.

Initial Planning Phase:

- Penyusunan awal RKP** (Initial RKP Formulation): This stage involves the initial formulation of the RKP, including the identification of the organization's vision, mission, and strategic goals.
- Penyusunan Rancangan Rangka SKPP** (Formulation of the SKPP Framework Design): This stage involves the development of the SKPP framework, including the identification of the organization's strategic priorities and the formulation of the SKPP framework design.
- Penyusunan Rancangan Rangka SKPP** (Formulation of the SKPP Framework Design): This stage involves the development of the SKPP framework, including the identification of the organization's strategic priorities and the formulation of the SKPP framework design.
- Penyusunan Rancangan Rangka SKPP** (Formulation of the SKPP Framework Design): This stage involves the development of the SKPP framework, including the identification of the organization's strategic priorities and the formulation of the SKPP framework design.

Review and Evaluation Phase:

- Penyusunan Rancangan Rangka SKPP** (Formulation of the SKPP Framework Design): This stage involves the development of the SKPP framework, including the identification of the organization's strategic priorities and the formulation of the SKPP framework design.
- Penyusunan Rancangan Rangka SKPP** (Formulation of the SKPP Framework Design): This stage involves the development of the SKPP framework, including the identification of the organization's strategic priorities and the formulation of the SKPP framework design.
- Penyusunan Rancangan Rangka SKPP** (Formulation of the SKPP Framework Design): This stage involves the development of the SKPP framework, including the identification of the organization's strategic priorities and the formulation of the SKPP framework design.
- Penyusunan Rancangan Rangka SKPP** (Formulation of the SKPP Framework Design): This stage involves the development of the SKPP framework, including the identification of the organization's strategic priorities and the formulation of the SKPP framework design.

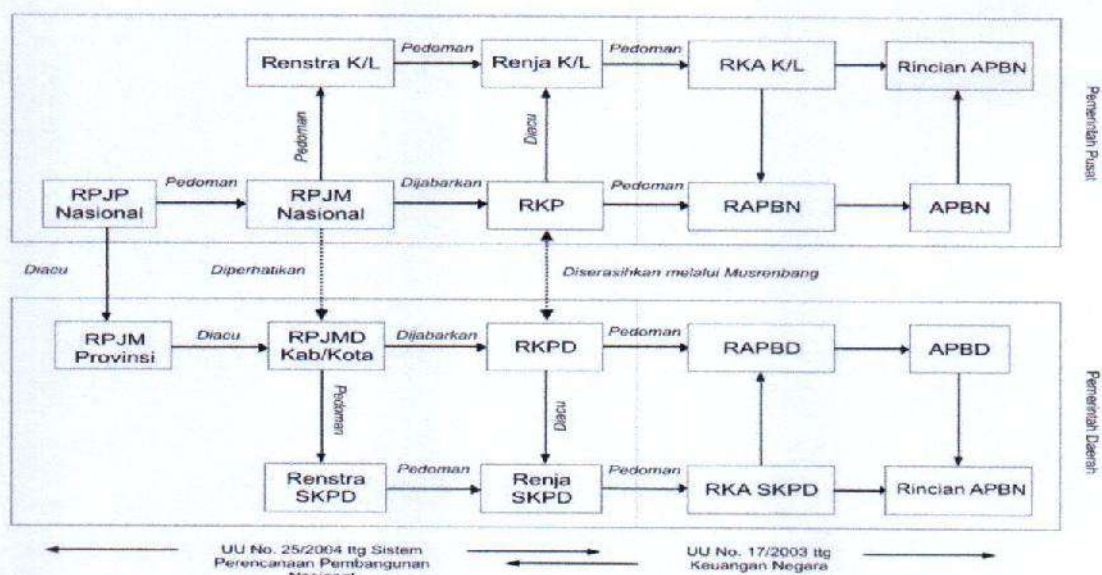
Implementation Phase:

- Penyusunan Rancangan Rangka SKPP** (Formulation of the SKPP Framework Design): This stage involves the development of the SKPP framework, including the identification of the organization's strategic priorities and the formulation of the SKPP framework design.
- Penyusunan Rancangan Rangka SKPP** (Formulation of the SKPP Framework Design): This stage involves the development of the SKPP framework, including the identification of the organization's strategic priorities and the formulation of the SKPP framework design.
- Penyusunan Rancangan Rangka SKPP** (Formulation of the SKPP Framework Design): This stage involves the development of the SKPP framework, including the identification of the organization's strategic priorities and the formulation of the SKPP framework design.
- Penyusunan Rancangan Rangka SKPP** (Formulation of the SKPP Framework Design): This stage involves the development of the SKPP framework, including the identification of the organization's strategic priorities and the formulation of the SKPP framework design.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Renja OPD merupakan penjabaran dan ada hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD, Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra SKPD dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS dan RAPBD

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.2
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



2.1.2 Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan RAPBD

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahunan (RKPD). RKPD tersebut memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Secara khusus, kewajiban daerah mempertimbangkan capaian standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Tim Anggaran Pemda (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA). Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Rancangan KUA diajukan kepada Kepala Daerah paling lambat awal bulan Juni untuk kemudian diteruskan ke DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni. Pembahasan

dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli. Berdasarkan KUA yang telah disepakati kemudian TAPD menyusun Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang berisi skala prioritas, urutan program dan plafon anggaran sementara. Rancangan PPAS tersebut diajukan oleh Kepala Daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi PPAS paling lambat akhir Juli tahun anggaran berjalan. KUA serta PPAS yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.

1.2 Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (16) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dalam Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 21 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 13);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Purworejo (lembaran daerah kabupaten purworejo tahun 2021 nomor 14);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2024 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Purworejo;
18. Peraturan Bupati Nomor 158 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 158 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja

Maksud dari penyusunan Renja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2024 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rancangan Renja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Bruno Tahun 2026.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja

Tujuan disusunnya Renja Kecamatan Bruno adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Renja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2026, tujuan disusunnya renja:

1. Mengantisipasi perkembangan keadaan yang terjadi pada tahun berjalan (2025)
2. Dokumen Renja merupakan acuan untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Renja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),

mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*) dengan target capaian hingga Tahun 2030; Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4 Review Terhadap RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai : Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan

program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan, dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tabel mengenai rencana kerja dan pendanaan tahun 2026

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa: a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. b. Kaidah-kaidah pelaksanaan. c. Rencana tindak lanjut. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama PD dan nama dan tanda tangan kepala PD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka penyusunan Renja Perangkat Daerah, perlu dilakukan kajian (review) terhadap hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun 2024, Kecamatan Bruno melaksanakan 6 program dan 15 kegiatan 47 Sub Kegiatan dengan perkiraan capaian kinerja sampai dengan akhir Tahun 2024 mencapai 100%. Berdasarkan Renstra Kecamatan Bruno Tahun 2025 – 2029, dengan Renja Perangkat Daerah 2024 Berdasarkan Renstra Kecamatan Bruno Tahun 2025 – 2029, Visi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode Tahun 2025 – 2029, yaitu “Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif (Purworejo Berseri)”. Untuk mencapai visi sebagaimana tersebut diatas telah dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut :

1. Bidang Sumber Daya Manusia, Meningkatkan kualitas SDM yang kompeten, produktif, dan bertaqwa kepada Tuhan YME serta lingkungan masyarakat yang sehat, berbudaya dan sejahtera;
2. Bidang Infrastruktur, Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah;
3. Bidang Lingkungan Hidup, Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
4. Bidang Ekonomi & Pariwisata, Meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi melalui peran serta dan kontribusi

pelaku ekonomi lokal;

5. Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.

Dari lima misi diatas yang terkait dengan tupoksi Kecamatan Bruno adalah Misi ke 5 yaitu Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi, dengan tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Bruno yakni : “Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah” dengan Sasarannya “Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat” dan “Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Perangkat Daerah”, untuk sasaran Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat indikatornya Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah), sedangkan sasaran Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah indikatornya Nilai Sakip Perangkat Daerah.

Sementara sasaran Kecamatan Bruno sebagai salah satu sasaran pokok Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purworejo adalah : “Terwujudnya aparatur dan pemerintahan yang profesional, amanah, bersih, bebas dari KKN dan demokratis dengan mengutamakan penegakan hukum, jaminan keamanan, dan ketertiban umum, didukung oleh adanya partisipasi masyarakat dan swasta yang tinggi “ Adapun Kinerja Sasaran dan program Kecamatan Bruno sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bruno Tahun 2025 - 2029

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)
		Akuntabilitas kinerja	Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai Sakip Perangkat

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
	teknologi informasi.	Perangkat Daerah	kinerja Perangkat Daerah	Daerah

Pada Tahun 2024 , Kecamatan Bruno melaksanakan 6 program dan 15 kegiatan 47 Sub Kegiatan. Adapun capaian target dan realisasi kinerja program Kecamatan Bruno Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini mempunyai tujuan agar penunjang urusan pemerintahan daerah berfungsi dengan baik dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kantor.

a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program.

- Perencanaan anggaran mendekati tepat dengan desain kegiatan, dibuktikan dengan capaian kinerja sampai dengan Desember sebesar 100%, artinya semua kebutuhan sampai dengan bulan Desember dapat tercukupi. Untuk Keuangan 97,57% Dengan rencana anggaran Rp. 2.539.138.681 dan realisasi anggaran Rp. 2.477.362.770 realisasi anggaran kurang maksimal dikarenakan adalah adanya efisiensi anggaran karena tidak tercapainya target pendapatan daerah.

b) Hambatan / masalah

- Kebutuhan anggaran kegiatan perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah penyerapan anggaran kurang maksimal dikarenakan dalam pelaksanaan sub kegiatan bersamaan dengan sub kegiatan lain .

c) Solusi yang dilakukan

- Dilakukan perhitungan perencanaan yang lebih rinci.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ke 2 ini mempunyai tujuan agar terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik, untuk itu dilakukan koordinasi dan fasilitasi terkait pemerintahan demi mendukung kinerja Kecamatan Bruno.

a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program

- Secara umum pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Pemerintahan terlaksana dengan baik ketercapaian kinerja program 100%, secara Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan namun untuk penyerapan kurang maksimal target anggaran Rp. 39.936.600. adapun realisasinya adalah Rp. 37.402.500 realisasi keuangan 93.29% % hal ini mendekati dengan perencanaan kebutuhan yang ada.

b) Hambatan / masalah

- Masih tingginya angka stunting di Kecamatan Bruno
- Belum adanya fasilitas Pendidikan yang memadai untuk jenjang Sekolah Kejuruan / Sekolah Tingkat Atas
- Pelayanan yang kurang maksimal

c) Solusi yang dilakukan

- Edukasi kepada masyarakat bekerjasama dengan PKH/TKS serta UPT Puskesmas
- Melakukan koordinasi dan audiensi dengan stakeholder terkait pelayanan Pendidikan
- Evaluasi dan tindaklanjut 9 (Sembilan) unsur penilaian pelayanan yang masih kurang

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ke 3 ini bertujuan terlaksananya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan khususnya di Kecamatan Bruno, sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat

a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program

- Perencanaan anggaran sudah mendekati tepat dengan desain kegiatan. Dengan rencana anggaran Rp. 217.662.900 dan realisasi anggaran Rp. 200.420.651 realisasi anggaran 92,08 % dan fisik 100 %.

b) Hambatan / masalah

- Tingkat pemahaman dan SDM perangkat desa yang satu dengan yang lainnya berbeda.
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam keikutsertaan dalam acara pemberdayaan yang diselenggarakan

Kecamatan

- Tidak semua usulan dalam musrenbang Tingkat Kecamatan dapat terealisasi.

c) Solusi

- Pembinaan Perangkat Desa untuk meningkatkan SDM
- Dalam setiap bulannya dilakukan rapat koordinasi dengan Aparatur Desa di Kecamatan
- Meningkatkan publikasi kepada masyarakat Bruno
- Koordinasi dan konsultasi yang lebih intens dengan *stakeholders* terkait, dan Pemerintah Kabupaten Purworejo sehingga usulan dalam musrenbang Kecamatan benar benar yang prioritas.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan Kegiatan yakni Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sehingga, Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program:

- Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan, dibuktikan dengan capaian kinerja 100% dan keuangan 87.19%, Rencana anggaran Rp. 66.532.100 adapun realisasinya Rp. 58.010.821.

b) Hambatan / masalah

- Adanya kejadian bencana alam yang tidak dapat diprediksi

c) Solusi

Selalu melaksanakan koordinasi dengan BPBD dan Satpol PP Damkar serta Forkopimcam Kecamatan Bruno

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum . Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator Program:

- Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan, dibuktikan dengan capaian kinerja baik fisik maupun keuangan 100%. Rencana anggaran Rp. 30.343.700 adapun realisasinya Rp. 25.683.700;

b) Hambatan / masalah

- Menyesuaikan jadwal dan kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan forkopimcam.

c) Solusi

- Koordinasi yang konsisten dengan forkopimcam dan stakeholder terkait.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ke 6 ini mempunyai tujuan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

a) Faktor-faktor yang mendukung kegagalan/keberhasilan pencapaian indikator program

- Perencanaan anggaran sudah tepat dengan desain kegiatan. Kondisi dan regulasi kadang berubah, harus menyesuaikan dengan pelaksanaannya. Rencana Anggaran Rp. 118.292.000 dan realisasinya Rp. 92.624.000.

b) Hambatan / masalah

- Terbatasnya jumlah SDM Kecamatan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada pemerintahan desa dimana terdapat 18 Desa dengan jarak tempuh cukup jauh, selain itu adanya permasalahan yang berbeda di setiap Desa.

c) Solusi yang dilakukan

- Melakukan pembentukan tim bekerjasama dengan lintas seksi lain dalam pelaksanaannya.
- Monitoring secara intens dan berkelanjutan dengan Desa.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bruno dan Pencapaian Renstra Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo s/d Tahun 2024 dapat diuraikan dalam tabel 2.2 (Tabel T-C.29) berikut ini :

Tabel TC 29

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Bruno dan Pencapaian Renstra Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo s/d
Tahun 2024

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10 = (5+7+9)	11=10/4
7	01	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	100	%	100	100	100	100%	100	100	100,00
7	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Keluaran : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35	Dokumen	5	7	7	100%	7	19	54,29
7	01	01	201	0001	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75	Dokumen	24	15	15	100%	16	55	73,33
7	01	01	201	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	5	Dokumen	1	1	1	100%	1	3	60,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	01	201	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	Dokumen	1	1	1	100%	1	3	60,00
7	01	01	201	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	5	Dokumen	1	1	1	100%	1	3	60,00
7	01	01	201	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	Dokumen	1	1	1	100%	1	3	60,00
7	01	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	80	Laporan	16	16	16	100%	16	48	60,00
7	01	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	Laporan	7	6	6	100%	6	19	63,33
7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Keluaran : Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat	100	%	100	100	100	100%	100		0,00
7	01	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22	Orang/Bulan	20	18	18	100%	19	57	259,09

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	01	202	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30	Laporan	6	6	6	100%	6	18	60,00
7	01	01	202	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	180	Laporan	35	26	26	100%	26	87	48,33
7	01	01	204		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Keluaran : Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	%	100	100	100	100%	100		0,00
7	01	01	204	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	2	Dokumen	1	1	1	100%	1	3	150,00
7	1	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keluaran : Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	%		100	100	100%	100		0,00
7	1	1	205	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100	Dokumen		12	12	100%	12	24	24,00
7	1	1	205	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Pegawai						0	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Keluaran : Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	100	100	100	100%	100		0,00
7	01	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	1	4	4	100%	4	9	180,00
7	01	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	Paket						0	0,00
7	01	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	Paket	1	3	3	100%	3	7	140,00
7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5	Paket	1	12	12	100%	12	25	500,00
7	01	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	Paket	2	6	6	100%	6	14	140,00
7	01	01	206	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10	Dokumen						0	0,00
7	01	01	206	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5	Paket	13	12	12	100%	12	37	740,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60	Laporan	13	12	12	100%	12	37	61,67
7	01	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	Laporan	24	12	12	100%	12	48	480,00
7	01	01	206	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13	Dokumen	1	5	5	100%	5	11	84,62
7	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran : Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	9	Jenis	2	2	3	150%		5	55,56
7	01	01	207	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	Unit	1					1	100,00
7	01	01	207	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Unit						0	0,00
7	01	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	Unit		52	52	100%		52	260,00
7	01	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	Unit		4	4	100%		4	66,67

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	01	207	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit						0	0,00
7	01	01	207	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit						0	0,00
7	01	01	207	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit						0	0,00
7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	10	Laporan	2	2	2	100%	2	6	60,00
7	01	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	1	12	12	100%	12	25	41,67
7	01	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	2	12	12	100%	12	26	43,33
7	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran : Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	5	Jenis	5	5	5	100%	5	15	300,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	01	209	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9	Unit	1	1	1	100%	1	3	33,33
7	01	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	9	8	8	100%	5	22	733,33
7	01	01	209	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	7	Unit	12					12	171,43
7	01	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6	Unit	19	9	9	100%	9	37	616,67
7	01	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	4	4	4	100%	3	11	366,67
7	01	01	209	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	13	1	1	100%	3	17	850,00
7	01	01	209	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit						0	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%	100	100	100	100%	100	100	100,00
7	01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Keluaran : Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30	Dokumen	2	1	1	100%	2	5	16,67
7	01	02	201	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6	Laporan	2					2	33,33
7	01	02	201	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30	Dokumen	7	1	1	100%	1	9	30,00
7	01	2	202		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Keluaran : Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	35	Dokumen	2	2	2	100%	2	6	17,14
7	01	2	202	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	30	Dokumen	7	1	1	100%	1	9	30,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	2	202	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Laporan	2	1	1	100%	1	4	80,00
7	01	2	203		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Keluaran : Hasil Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1	Dokumen	0					0	0,00
7	01	2	203	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3	Dokumen						0	0,00
7	01	2	204		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	6	Dokumen	0					0	0,00
7	01	2	204	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3	Laporan						0	0,00
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	100	%	100	100	100	100%	100	100	100,00
7	01	03	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Keluaran : Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10	Dokumen		2	2	100%		2	20,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	03	201	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4	Lembaga Kemasyaraka tan	1	2	2	100%	4	7	175,00
7	01	03	201	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50	Laporan	2	1	1	100%	1	4	8,00
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	%	100	100	100	100%	100	100	100,00
7	01	04	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Keluaran : Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10	Laporan	2	2	2	100%	1	5	50,00
7	01	04	201	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	30	Laporan	8	1	1	100%	1	10	33,33
7	01	04	201	0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10	Laporan	3	1	1	100%	1	5	50,00

9

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	04	202		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Keluaran : Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5	Dokumen	1	1	1	100%	1	3	60,00
7	01	04	202	0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5	Laporan	2	1	1	100%	1	4	80,00
7	01	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%	100	100	100	100%	100	100	100,00
7	01	5	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Keluaran : Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	10	Dokumen	1		2		1	4	40,00
7	01	05	201	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	176	Orang		20	20	100%	1	21	11,93

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Indonesia	Kesatuan Republik Indonesia									
7	01	05	201	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4	Orang						0	0,00
7	01	05	201	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5	Dokumen	19	1	1	100%	1	21	420,00
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	100	100	100	100%	100	100	100,00
7	01	06	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Keluaran : Hasil Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	70	Dokumen	10	9	8	89%	9	27	38,57
7	01	06	201	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3	Dokumen		1	1	100%	1	2	66,67

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	01	06	201	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5	Dokumen	19	1	1	100%	1	21	420,00
7	01	06	201	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5	Dokumen	19	1	1	100%	1	21	420,00
7	01	06	201	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	5	Dokumen	19	1	1	100%	1	21	420,00
7	01	06	201	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5	Dokumen	1					1	20,00
7	01	06	201	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5	Dokumen	19	1	1	100%	1	21	420,00
7	01	06	201	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5	Dokumen	2	1	1	100%	1	4	80,00
7	01	06	201	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3	Dokumen						0	0,00
7	01	06	201	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban	5	Dokumen						0	0,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Th. 2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						Umum									
7	01	06	201	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	5	Dokumen	19					19	380,00
7	01	06	201	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	5	Dokumen	2	1	1	100%	1	4	80,00
7	01	06	201	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	5	Dokumen	2					2	40,00
7	01	06	201	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5	Laporan	1	1	1	100%	1	3	60,00
7	01	06	201	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	3	Laporan						0	0,00

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pasal 14 dan 15 UU Nomor 25 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa hak dan kewajiban penyelenggara adalah sebagai berikut :

1) Hak – hak penyelenggara :

- a) Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;
- b) Melakukan Kerjasama;
- c) Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan negara;
- d) Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-uandangan.

2) Kewajiban penyelenggara :

- a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan
- b. Menyusun, menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan
- c. Menempatkan pelaksana yang kompeten
- d. Menyediakan sarana, prasarana dan atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai.

- e. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 juga mengamanatkan pedoman dasar dalam mengelola pelayanan publik, sebagaimana tercantum pada pasal 4 yang memuat asas penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu :

- 1) Kepentingan umum,
- 2) Kepastian hukum,
- 3) Keseimbangan hak dan kewajiban,
- 4) Professional,
- 5) Partisipatif,
- 6) Akuntabilitas,
- 7) Ketepatan waktu,
- 8) Keterbukaan,
- 9) Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Dalam rangka melaksanakan pelayanan publik, pemerintah harus sanggup melakukan pelayanan minimal, karena pemberian pelayanan ini merupakan hak dasar masyarakat selaku konsumen.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal merupakan standar dengan batas – batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakatn yang mencakup jenis pelayanan, Indikator dan nilai.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Camat Bruno selaku pemimpin wilayah di Kecamatan Bruno telah menerapkan Langkah – langkah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pendayagunaan pelimpahan sebagian kewenangan kepada Camat untuk melaksanakan pelayanan prima.

- b. Mendayagunakan aparat Kecamatan yang pintar dan berpengalaman untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan tugas di lapangan.
- c. Meningkatkan koordinasi intern antar Seksi untuk melaksanakan Peraturan Bupati Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Purworejo.
- d. Meningkatkan motivasi kerja aparat untuk mengatasi turunnya kepercayaan / legitimasi terhadap pemerintah.

Tabel TC- 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Bruno

[illegible]

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Th. 2024 (thn n-2)	Th. 2025 (thn n-1)	Th. 2026 (thn n)	Th. 2027 (thn n+1)	Th. 2024 (thn n-2)	Th. 2025 (thn n-1)	Th. 2026 (thn n)	Th. 2027 (thn n+1)	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)		V			86,25	86,75			86,25	86,75	
	Nilai Sakip Perangkat Daerah		V			70	70,5			70	70,5	
	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten					100%	100%			100%	100%	
	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					100%	100%			100%	100%	
	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan					100%	100%			100%	100%	
	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum					100%	100%			100%	100%	
	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					100%	100%			100%	100%	
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					100%	100%			100%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Analisis isu-isu penting/strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan Bruno. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan aksestabilitas prioritas program dan kegiatan, dapat dioperasionalkan, secara moral dan etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Rumusan isu strategis diperoleh dengan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang ada selama kurang lebih lima tahun yang lalu.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Bruno sesuai dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Purworejo, mempunyai peluang sekaligus tantangan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain :

- 1) Tuntutan dan harapan warga masyarakat terhadap perwujudan *Good Government* merupakan peluang pada Kecamatan Bruno untuk selalu meningkatkan kinerja.
- 2) Kepedulian dan kebersamaan pihak swasta dalam mendukung program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan.
- 3) Menurunnya kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- 4) Para penyelenggara Pemerintah Desa belum secara optimal memahami regulasi tentang pemerintahan desa yang cenderung berubah.
- 5) Adanya tambahan penghasilan meningkatkan kinerja sumberdaya pegawai.
- 6) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan sarana prasarana maupun pengembangan potensi alam

Potensi permasalahan pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi serta identifikasinya dapat diuraikan menurut urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Isu - isu dan permasalahan berikut perlu penanganan secara komprehensif. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bruno sebagai berikut :

1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi aparatur Kecamatan;
2. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
3. Kebutuhan akan sistem informasi yang terintegrasi antar instansi terkait.
4. Perlu adanya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja perencanaan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pelayanan internal.
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Bruno.

Isu - isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Bruno adalah situasi dan kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa yang akan datang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka minimal 5 (lima) tahun kedepan.

Kondisi yang diinginkan dan Proyeksi Kedepan.

1. Kondisi yang diinginkan

- a. Terciptanya *good government* sehingga mewujudkan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
- b. Terciptanya pemanfaatan teknologi informasi pada pelayanan publik sehingga pelayanan menjadi efektif dan efisien.
- c. Terwujudnya sistem informasi yang terintegrasi sehingga penanganan masalah lebih cepat dan tepat.
- d. Pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Terlaksananya kemantapan koordinasi antar Sekertariat, Seksi, Sub bagian, Desa dan dinas instansi di Lingkup Kecamatan Bruno untuk meningkatkan kinerja sebagai berikut:
 - 1) Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- 2) Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan.
 - 3) Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan.
 - 4) Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kecamatan dalam perencanaan pembangunan.
- f. Komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan yang melibatkan publik.
- g. Munculnya komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan dokumen perencanaan yang telah disepakati.

2.4 Review Terhadap Ranwal RKPD

RKPD Tahun 2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan perangkat daerah dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Bruno, maka diperlukan kajian program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas. Review RKPD dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara RKPD dengan hasil analisa kebutuhan setelah dilakukan pembahasan dalam forum perangkat daerah, dan kajian program dan kegiatan. Berdasarkan perbandingan antara RKPD dengan rancangan akhir dan hasil analisis kebutuhan terdapat beberapa temuan yaitu :

- 1) Semua nama program dan kegiatan dalam RKPD sama dengan hasil analisis kebutuhan, hanya besaran anggaran dan target outputnya yang berbeda
- 2) Pagu rancangan akhir lebih rendah dari hasil analisis kebutuhan, sehingga tidak semua rencana kegiatan bisa terbiayai dan ada beberapa kegiatan atau output masuk dalam kategori longlist

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran tabel 2.6 (Tabel T-C.31). berikut:

Tabel T-C. 31
Reviu Terhadap RKPD Tahun 2026

Kode	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	UNSUR KEWILAYAHAN				3.391.186.802	UNSUR KEWILAYAHAN				2.951.051.123	
7.01	KECAMATAN				3.391.186.802	KECAMATAN				2.951.051.123	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.781.088.702	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.355.819.821	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				51.019.800	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.897.000	
7.01.01.2.01.000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	32.051.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22 Dokumen	2.629.000	
7.01.01.2.01.000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			

Kode	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
7.01.01.2.01.000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
7.01.01.2.01.000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.875.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			
7.01.01.2.01.000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
7.01.01.2.01.000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
7.01.01.2.01.000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	5.093.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan	2.268.000	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa			2.094.784.503	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa			2.535.312.773	

Kode	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/Bulan	2.081.431.403	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/Bulan	2.534.022.773	
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	2.725.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Laporan	10.628.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26 Laporan	1.290.000	
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				2.500.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				2.000.000	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.500.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	16 Dokumen	500.000	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				6.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				3.750.000	

Kode	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
7.01.01.2.05.000 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	6.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17 Dokumen	875.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				140.111.450	Administrasi Umum Perangkat Daerah				69.815.200	
7.01.01.2.06.000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.345.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.333.000	
7.01.01.2.06.000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	12.001.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	7.473.900	
7.01.01.2.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	24.085.950	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.084.400	
7.01.01.2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	9.657.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	3.382.000	
7.01.01.2.06.000 7	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	19.070.000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	9.685.300	

Kode	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	9.750.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.500.000	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	49.990.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	14.670.000	
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	5.212.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	2.686.600	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	2 Jenis	247.616.900	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan			
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	142.877.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	120.066.049	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				120.066.049	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				55.976.450	

Kode	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
7.01.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	21.780.049	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16.552.850	
7.01.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	98.286.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	39.423.600	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				118.990.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				111.060.000	
7.01.01.209.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	38.220.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	34.880.000	

9

Kode	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
7.01.01.2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	26.350.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	23.700.000	
7.01.01.2.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	6.490.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 Unit	6.490.000	
7.01.01.2.09.000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2Unit	40.740.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	38.800.000	
7.01.01.2.09.001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.190.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.190.000	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				92.136.200	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				36.700.900	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				78.696.200	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					

Kode	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
7.01.02.2.01.000 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6 Dokumen	78.696.200	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				13.440.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				36.700.900	
7.01.02.2.02.000 1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	8.499.800	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	2.895.600	
7.01.02.2.02.000 2						Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	29.632.700	
7.01.02.2.02.000 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4.940.200	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	4.172.600	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				194.773.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				62.334.400	

9

Kode	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				194.773.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				62.334.400	
7.01.03.2.01.000 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga	24.647.300	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4 Lembaga	7.586.400	
7.01.03.2.01.000 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	170.125.700	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	54.748.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				65.815.200	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				17.183.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				61.245.200	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				16.308.000	
7.01.04.2.01.000 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	42.035.200	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	10.533.000	

Kode	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
7.01.04.2.01.000 2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	19.210.000	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	5.775.000	
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				4.570.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				875.000	
7.01.04.2.02.000 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	4.570.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	875.000	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				36.528.700	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				15.803.600	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				126.873.700	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				15.803.600	

Kode	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
7.01.05.2.01.000 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	24 orang	106.640.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	90 orang	2.990.000	
7.01.05.2.01.000 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	20.233.700	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	12.813.600	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				130.500.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				40.556.800	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				130.500.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				40.556.800	

Kode	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
7.01.06.2.01.000 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	9.910.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Dokumen	2.645.000	
7.01.06.2.01.000 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	28.867.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	10.261.800	
7.01.06.2.01.000 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	40.688.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	10.520.000	
7.01.06.2.01.000 5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	20.480.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Dokumen	7.520.000	
7.01.06.2.01.000 7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	2.650.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	2.120.000	
7.01.06.2.01.000 8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	7.935.000	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Dokumen	2.440.000	

Kode	RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
7.01.06.2.01.001 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	7.860.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	2.200.000	
7.01.06.2.01.000 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	7.630.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen	2.850.000	
7.01.06.2.01.001 7	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan	4.480.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada pelaksanaan Renja Kecamatan Bruno Tahun 2026, terdapat usulan program maupun kegiatan dari masyarakat.

2.5.1. Proses Perolehan Usulan Program/Kegiatan dari Musrenbang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum pertemuan antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah Provinsi/kabupaten/kota sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah dalam rangka membahas rancangan dokumen rencana pembangunan daerah menjadi rancangan akhir dokumen rencana pembangunan daerah.

Bahan masukan Musrenbang dari Musrenbang tingkat Kecamatan bersama dengan Desa dan pihak terkait.

2.5.2. Kesesuaian Usulan Musrenbang dengan Tugas, Fungsi, dan Pelayanan Perangkat Daerah

Semua usulan yang masuk dalam rangka penyusunan rancangan rencana kerja tahun 2026 sesuai dengan tugas, fungsi dan pelayanan Kecamatan Bruno.

2.5.3. Usulan Program/Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/Kegiatan diperoleh pada pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan bulan Februari 2025 dan disajikan dalam tabel 2.7 (Tabel T-C.32) dibawah ini:

KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN KEGIATAN	LOKASI DESA	volume	PAGU
5	6	7	8	9
Rehabilitasi Jalan (lebar 3 m)	Jalan Rusak Sedang banyak yang sudah berlubang sehingga menghambat baik segi perekonomian warga sekitar maupun akses jalan menuju sarana Olahraga (Lapangan) dan JUT tidak bisa lancar.	Jambul Bol, Dukuh Lor Dusun BrondongKidul Desa Brondong Kecamatan Bruno, Kab. Purworejo, Bruno, Brondong		3.682.297.000

KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN KEGIATAN	LOKASI DESA	volume	PAGU
Rehabilitasi Jalan (lebar 4 m)	Jalan Merupakan Jalan Utama desa dan merupakan Jalan Akses Ekonomi Masyarakat,yang kewenanganya sudah pada Dinas DPUPR sehingga desa tidak dapat membangun menggunakan APBDes padahal keadaan saat ini Jalan tersebut sudah Rusak Berat.	Jalan Utama desa Karanggedang-Cepedak, Kab. Purworejo		3.941.441.000
Rehabilitasi Jalan (lebar 5 m)	Masih banyaknya jalan berlobang sehingga membahayakan pengendara yang lewat	Desa Gunungcondong, Kab. Purworejo, Bruno, Gunungcondong		4.280.962.000
Rehabilitasi Jalan (lebar 5 m)	Peningkatan ruas Jalan Kabupaten (PU) Gunungcondong - Kemranggen- Pamriyan	Desa Kemranggen, Bruno , Purworejo, Kab. Purworejo, Bruno, Kemranggen		4.280.962.000
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan Pembangunan Baru	Masih ada warga yang kondisi rumahnya belum layak huni	Desa Kemranggen Kecamatan Bruno, Kab. Purworejo, Bruno, Kemranggen		40.000.000
Pembangunan Jamban Sehat	Masih Kurangnya Jamban Sehat Warga Desa sehingga perlu dilaksanakan pembuatan/pembangunan jamban Sehat	Desa Cepedak, Kab. Purworejo, Bruno, Cepedak		7.000.000
Pembangunan Jalan Usaha Tani	Rehab jalan usaha tani dari sikedog sampai dengan desa pengarengan kab wonosobo	Dusun Pawotan RW 04 Desa kaliwungu, Kab. Purworejo, Bruno, Kaliwungu		206.611.000
Pembangunan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani Sewu sekaligus jalan penghubung antar Desa Gowong - Brondong masih berwujud tanah perlu pengerasan/rabat beton.	Blok Mberan sampai Blok Wates, Kab. Purworejo		206.611.000
Rehabilitasi Drainase	Aliran air hujan belum tertata	Pakisarum, Kab. Purworejo, Bruno, Pakisarum		3.475.000
Alat Penerangan Jalan Umum	Perlunya penerangan jalan umum (PJU) untuk mendukung pergerakan masyarakat/aktivitas di malam hari untuk meminimalisir resiko	Dusun krajan, dusun kaliurang, dusun munggang sari, dusun peeniron wetan, dusun peniron kulon, Kab. Purworejo, Bruno, Plipiran		26.301.000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi

Visi pembangunan nasional dalam RPJPN 2025-2045 adalah Indonesia Emas 2045 yakni pandangan bangsa Indonesia mengenai keadaan bangsa yang diinginkan pada 100 (seratus) tahun kemerdekaan. Seiring dengan akan berakhirnya RPJMN 2021-2026, pemerintah telah menyusun RPJMN 2025-2029. RPJMN ke-IV RPJMN 2021-2026 merupakan periode terakhir atau tahap kelima dari RPJPN 2005-2025. Adapun arah RPJMN 2025-2029 adalah untuk mencapai tiga sasaran utama pembangunan nasional, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Di dalam RPJMN ini dituangkan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Purworjo Tahun 2025-2029, disusunlah strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan pada setiap tujuan dan sasaran daerah dijabarkan sebagai berikut.

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran dalam rangka pencapaian tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas pendidikan dan budaya literasi masyarakat
- b. Meningkatnya derajat kesehatan untuk masyarakat
- c. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat

2. Peningkatan Pemerataan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Wilayah

Sasaran dalam rangka pencapaian tujuan peningkatan pemerataan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah adalah Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah serta kualitas infrastruktur dasar permukiman

3. Menurunnya Risiko Bencana

Sasaran dalam rangka pencapaian tujuan menurunnya risiko bencana adalah Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan daerah

4. Peningkatan Produktivitas Perekonomian Daerah

Sasaran dalam rangka pencapaian tujuan peningkatan produktivitas perekonomian daerah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya produktivitas perekonomian daerah yang berbasis pada sektor unggulan yang disertai peningkatan kapasitas ekosistem riset dan inovasi
 - b. Meningkatnya kondusivitas ekosistem investasi daerah melalui kolaborasi lintas sektoral
5. Pemerataan dan Inklusivitas Perekonomian Daerah
- Sasaran dalam rangak pencapaian tujuan pemerataan dan inklusivitas perekonomian daerah sebagai berikut.
- a. Menurunnya ketidakcukupan konsumsi pangan
 - b. Meningkatnya akses masyarakat terhadap lapangan kerja
 - c. Menurunnya ketimpangan pengeluaran penduduk
 - d. Meningkatnya pembangunan desa
6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berkeadilan, Responsis Berbasis Teknologi Informasi
- Sasaran dalam rangak pencapaian tujuan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berkeadilan, responsif berbasis teknologi informasi sebagai berikut.
- a. Meningkatnya profesionalisme dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
 - b. Meningkatnya pelayanan publik yang responsif dan inovatif
 - c. Meningkatnya Kondusivitas Wilayah

3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Renja Perangkat Daerah

Kecamatan Bruno adalah Misi ke 5 yaitu Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi, dengan tujuan yang hendak dicapai Kecamatan Bruno yakni : "Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah" dengan Sasarannya "Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat" dan "Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Perangkat Daerah", untuk sasaran Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat indikatornya Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah), sedangkan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah indikatornya Nilai Sakip Perangkat Daerah.

Sementara sasaran Kecamatan Bruno sebagai salah satu sasaran pokok Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purworejo adalah : “Terwujudnya aparatur dan pemerintahan yang profesional, amanah, bersih, bebas dari KKN dan demokratis dengan mengutamakan penegakan hukum, jaminan keamanan, dan ketertiban umum, didukung oleh adanya partisipasi masyarakat dan swasta yang tinggi “ Adapun Kinerja Sasaran dan program Kecamatan Bruno sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Bruno
Tahun 2025 - 2029

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
1.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang responsif dan inovatif berbasis teknologi informasi.	Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat serta Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (Perangkat Daerah)
			Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Adapun program yang telah direncanakan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD
 - c. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Dacrah
 - Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
- Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, sub kegiatan:

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di

Wilayah Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Harmonisasi
 - Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, sub kegiatan:
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, sub kegiatan:
 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang telah ditetapkan. Kegiatan dilakukan juga oleh masyarakat sebagai respons terhadap kebijaksanaan / program yang dikembangkan instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

a. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

1. Program dan kegiatan tersebut ditetapkan dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Purworejo yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029;
2. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan dan program prioritas.

b. Program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pengarusutamaan Gender :

Dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya PUG secara terpadu dan terkoordinasi, didalam intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. PUG menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Kecamatan Bruno Program dan Kegiatan yang mendukung pengarusutamaan gender :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan untuk Fasilitasi pelayanan public Kecamatan
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa untuk fasilitasi Kegiatan PKK dan fasilitasi Musrenbang Tingkat Kecamatan

c. Tabel rencana program dan kegiatan

Rumusan Rencana program dan kegiatan Kecamatan Bruno
Tahun 2026 dapat dilihat dalam tabel 3.1 (tabel T-C. 33):

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN BRUNO KAB. PURWOREJO
TAHUN 2026

[illegible]

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
														Nasional	Daerah				
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				17 Dokumen	876.000,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur		2.250.000,00	KECAMATAN BRUNO
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	69.815.200,00			-	-	Aparatur		154.122.595,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	10.333.000,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur		11.379.500,00	KECAMATAN BRUNO
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				3 Paket	7.473.900,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur		13.201.100,00	KECAMATAN BRUNO
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	20.084.400,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur		26.494.548,00	KECAMATAN BRUNO
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Burang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	3.382.000,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur		10.623.250,00	KECAMATAN BRUNO
7	01	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material														
						Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 Paket	9.685.300,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur		20.977.060,00	KECAMATAN BRUNO
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	1.500.000,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur		10.725.000,00	KECAMATAN BRUNO
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	14.670.000,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur		54.989.000,00	KECAMATAN BRUNO
7	01	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5 Dokumen	2.686.600,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur		5.733.200,00	KECAMATAN BRUNO
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	-			2 Laporan	55.976.450,00			-	-	Aparatur		132.072.654,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	16.552.850,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur		23.958.054,00	KECAMATAN BRUNO
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Pradiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	39.423.600,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur	108.114.600,00	KECAMATAN BRUNO	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	-			5 Jenis	111.060.000,00			-	-	Aparatur	130.889.000,00		
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	34.880.000,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur	42.042.000,00	KECAMATAN BRUNO	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	23.700.000,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur	28.985.000,00	KECAMATAN BRUNO	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	6.490.000,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur	7.139.000,00	KECAMATAN BRUNO	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	38.800.000,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur	44.814.000,00	KECAMATAN BRUNO	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7.190.000,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Aparatur	7.909.000,00	KECAMATAN BRUNO	
2	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-			100 %	36.700.900,00						52.739.300,00		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-			3 Dokumen	36.700.900,00			-	-	Masyarakat	52.739.300,00		
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	2.895.500,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat	9.349.780,00	KECAMATAN BRUNO	
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
						Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	29.632.700,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat	37.955.300,00	KECAMATAN BRUNO	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)				
														Nasional	Daerah							
	7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	4.172.600,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat	5.434.220,00	KECAMATAN BRUNO				
3	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	-		100 %	62.334.400,00					-	214.250.300,00					
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-		2 Dokumen	62.334.400,00					-	214.250.300,00					
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa																
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				4 Lembaga Kemasyarakatan	7.586.400,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat	27.112.030,00	KECAMATAN BRUNO				
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	54.748.000,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat	187.138.270,00	KECAMATAN BRUNO				
4	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		100 %	17.183.000,00					-	72.396.720,00					
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		2 Dokumen	16.308.000,00					-	67.369.720,00					
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	10.533.000,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat	46.238.720,00	KECAMATAN BRUNO				
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	5.775.000,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat	21.131.000,00	KECAMATAN BRUNO				
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		1 Dokumen	875.000,00					-	5.027.000,00					
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																

9

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
															Nasional	Daerah				
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	875.000,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		5.027.000,00	KECAMATAN BRUNO
5	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	-			100 %	15.803.600,00					Masyarakat	-	139.561.070,00	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	-			2 Dokumen	15.803.600,00			-	-	Masyarakat	-	139.561.070,00	
	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				90 Orang	2.990.000,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		117.304.000,00	KECAMATAN BRUNO
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	12.813.600,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		22.257.070,00	KECAMATAN BRUNO
6	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			100 %	40.556.800,00					Masyarakat	-	138.622.000,00	
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-			8 Dokumen	40.556.800,00			-	-	Masyarakat	-	138.622.000,00	
	7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	2.645.000,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		10.901.000,00	KECAMATAN BRUNO
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	10.261.800,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat		31.753.700,00	KECAMATAN BRUNO

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asat Desa														
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Asat Desa				2 Dokumen	10.520.000,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat	44.756.800,00	KECAMATAN BRUNO	
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	7.520.000,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat	22.528.000,00	KECAMATAN BRUNO	
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	2.850.000,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat	8.393.000,00	KECAMATAN BRUNO	
7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	2.120.000,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat	2.915.000,00	KECAMATAN BRUNO	
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Dokumen	2.440.000,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat	8.728.500,00	KECAMATAN BRUNO	
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	2.200.000,00	Kab. Purworejo, Bruno, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Masyarakat	8.646.000,00	KECAMATAN BRUNO	
										J U M L A H	2.951.015.123,00						3.381.778.372,00		

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Bruno Tahun 2026
dapat disajikan dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Tahun 2026 Kecamatan Bruno

NO	URUSAN	PROGRAM	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PD / KET.
1	Kewilayahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.778.436.423	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	36.700.900	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	62.334.400	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.183.000	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.803.600	
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	40.556.800	
	Jumlah		2.951.015.123	

Sasaran Program dan Keluaran Kegiatan Kecamatan Bruno Tahun 2026 dapat disajikan dalam tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2
Sasaran Program dan Keluaran Kegiatan Kecamatan Bruno
Tahun 2026

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Program/Keluaran Kegiatan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlayannya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik
10	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
11	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
12	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan
13	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
14	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terselenggaranya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
15	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
16	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
17	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum
18	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
19	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terbina dan Terawasinya Pemerintahan Desa
20	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Hasil Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB V PENUTUP

Renja tahun 2026 yang disusun oleh Kecamatan Bruno adalah rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang berjangka 5 (lima) tahun. Rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran sehingga pada akhir tahun anggaran pelaksanaannya dapat diukur.

Penyusunan Rencana Kerja ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo selama Tahun Anggaran 2026 dan sebagai pengukur capaian kinerja organisasi dalam tahun kedepan.

5.1 Catatan Penting

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan Renja Kecamatan Bruno Tahun 2026 yaitu :

Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun 2026 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan arah dan tujuan Rencana Pembangunan jangka Menengah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026 dan Tahun 2025 - 2029. Selain itu Rencana Kerja juga sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

5.2 Kaidah-Kaidah

Dalam pelaksanaan Renja PD tahun 2026, Kecamatan Bruno memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut :

1. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024

2. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya
3. Tujuan yang dikehendaki
4. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya
5. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
6. Dokumen Renja Sebagai salah satu dasar penyusunan RKA-PD dengan memperhatikan ketersediaan Anggaran yang ada

5.3 Rencana Tindak lanjut

Langkah-langkah yang ditempuh dalam upaya pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerjanya antara lain sebagai berikut :

- 1) Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- 2) Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan.
- 3) Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan.
- 4) Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kecamatan dalam perencanaan pembangunan.

Demikian Kecamatan Bruno Tahun 2026 semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

BUPATI PURWOREJO



YULI HASTUTI